

Nama: Rizka Mufidah

NPM: 2313031001

UAS Ekonomi Pendidikan

1. Efisiensi Anggaran Pendidikan

1) Efisiensi Internal dan Eksternal

Efisiensi internal pendidikan dilihat dari seberapa optimal sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output pendidikan. Pada kasus ini, sebagian besar anggaran diserap untuk pembangunan gedung, sementara pelatihan guru dan media pembelajaran hampir tidak mendapat porsi. Hasilnya, angka partisipasi memang naik, tapi kualitas belajar siswa tidak ikut membaik, ini menunjukkan inefisiensi internal yang cukup jelas.

Dari sisi efisiensi eksternal, yang diukur adalah relevansi output pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan ekonomi. Karena kualitas belajar stagnan, lulusan yang dihasilkan pun belum tentu punya kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Jadi investasi besar yang sudah dikeluarkan tidak benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas SDM secara nyata.

2) Dampak dan Rekomendasi Kebijakan

Dampak dari kebijakan ini cukup serius dalam jangka panjang. Meskipun lebih banyak anak yang bersekolah, kualitas kompetensi mereka rendah, sehingga produktivitas tenaga kerja di daerah tersebut sulit meningkat. Anggaran besar yang sudah dikeluarkan pun menjadi kurang efektif karena tidak menasar komponen yang paling menentukan mutu pembelajaran.

Beberapa rekomendasi yang bisa dipertimbangkan:

- Realokasi anggaran ke pelatihan guru secara berkala, karena kualitas guru adalah faktor paling langsung yang memengaruhi hasil belajar siswa.
- Alokasi khusus untuk pengadaan media dan teknologi pembelajaran digital yang merata ke semua sekolah.
- Menerapkan evaluasi anggaran berbasis hasil, di mana pencairan dana berikutnya dikaitkan dengan capaian mutu, bukan hanya realisasi fisik.

2. Ketimpangan Akses Pendidikan

1) Bentuk Ketimpangan Pendidikan

Ketimpangan yang tergambar pada kasus ini adalah ketimpangan spasial atau geografis, yaitu kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ini bukan hanya soal fasilitas fisik, tapi menyangkut hampir semua aspek: tenaga pendidik,

teknologi, dan akhirnya hasil belajar siswa. Siswa di kota dan desa menerima kualitas pengalaman belajar yang sangat berbeda, padahal mereka sama-sama berhak atas pendidikan yang layak.

Kalau mengacu pada konsep keadilan pendidikan, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem yang ada belum mampu mengompensasi perbedaan kondisi geografis. Anak yang lahir di desa otomatis menghadapi hambatan lebih besar dalam memperoleh pendidikan berkualitas, sesuatu yang seharusnya tidak ditentukan oleh faktor tempat lahir.

2) Dampak Ekonomi Jangka Panjang dan Solusi

Dampak jangka panjangnya bisa cukup berat, di antaranya:

- Terbentuknya lingkaran kemiskinan antargenerasi anak dari daerah terpencil tumbuh dengan modal manusia lebih rendah, sehingga peluang ekonominya pun lebih terbatas.
- Ketimpangan produktivitas antardaerah semakin melebar, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi regional secara keseluruhan.
- Migrasi massal ke kota oleh tenaga muda yang terdidik, membuat daerah asal semakin kekurangan SDM berkualitas.

Solusi yang bisa diusulkan antara lain:

- Afirmasi anggaran Pendidikan sekolah di daerah tertinggal perlu mendapat alokasi lebih besar, bukan sekadar rata.
- Program guru penugasan khusus dengan insentif yang menarik, baik dari segi finansial maupun jenjang karir.
- Percepatan infrastruktur internet desa agar kesenjangan teknologi tidak semakin memperdalam ketimpangan belajar.

3. Pengangguran Terdidik

1) Analisis Berdasarkan Teori Human Capital

Teori human capital (Becker) memandang pendidikan sebagai investasi: individu mengorbankan waktu dan biaya dengan harapan mendapat return berupa peningkatan produktivitas dan penghasilan. Tapi kasus Kota B menunjukkan bahwa investasi itu tidak menghasilkan return yang diharapkan, setidaknya ada tiga penyebab utamanya:

- Kualitas kompetensi lulusan tidak sesuai kebutuhan industry kurikulum tidak diperbarui sesuai perkembangan dunia kerja, sehingga lulusan masuk pasar kerja dengan keahlian yang sudah kurang relevan.
- Melemahnya nilai sinyal Pendidikan ketika terlalu banyak lulusan dengan kualitas tidak merata, ijazah kehilangan fungsinya sebagai sinyal kompetensi di mata pemberi kerja.
- Overproduction of graduates jumlah lulusan tumbuh lebih cepat dari kapasitas pasar kerja untuk menyerapnya, terutama pada bidang-bidang yang sudah jenuh.

2) Hubungan Pendidikan, Pasar Kerja dan Rekomendasi

Yang terjadi di Kota B adalah diskoneksi antara sistem pendidikan dan dunia kerja. Perguruan tinggi memproduksi lulusan berdasarkan program studi yang ada, tapi tidak selalu melihat apakah lulusan itu memang dibutuhkan industri. Tidak ada mekanisme feedback yang berjalan baik di antara keduanya.

Rekomendasi untuk memperbaiki kondisi ini:

- Memperkuat program link and match perguruan tinggi perlu melibatkan industri dalam penyusunan kurikulum, magang, dan rekrutmen.
- Diversifikasi jalur pendidikan, termasuk penguatan politeknik dan pendidikan vokasi yang lebih berorientasi praktik.
- Menyediakan sistem informasi pasar kerja yang terbuka, agar calon mahasiswa bisa membuat keputusan studi yang lebih strategis.

4. Kenaikan Biaya Pendidikan

1) Pendidikan sebagai Barang Publik dan Barang Privat

Barang publik dicirikan oleh sifat non-rival (konsumsi satu orang tidak mengurangi untuk orang lain) dan non-excludable (tidak bisa dikecualikan berdasarkan kemampuan bayar). Sebaliknya, barang privat bersifat rival dan excludable.

Universitas swasta dalam kasus ini lebih mendekati barang privat kapasitas terbatas dan akses ditentukan oleh kemampuan membayar. Kenaikan UKT 25% semakin memperkuat sifat itu karena semakin banyak orang yang secara efektif tidak mampu mengaksesnya. Namun di sisi lain, pendidikan punya eksternalitas positif yang luas bagi Masyarakat tenaga kerja terdidik mendorong produktivitas dan inovasi sehingga ia tidak bisa diperlakukan sepenuhnya seperti barang privat biasa.

2) Dampak Sosial Ekonomi

Kenaikan biaya kuliah yang signifikan membawa beberapa dampak yang perlu diperhatikan:

- Mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah berisiko putus kuliah atau tidak bisa melanjutkan pendidikan, sehingga peluang mobilitas sosialnya menyempit.
- Ketimpangan sosial berpotensi menguat jika pendidikan tinggi hanya terjangkau oleh kelas menengah ke atas, akumulasi modal manusia pun menjadi tidak merata.
- Sebagian mahasiswa mungkin terpaksa mengambil pinjaman, yang berpotensi menjadi beban finansial jangka panjang.

3) Perlunya Intervensi Pemerintah

Menurut saya, pemerintah memang perlu melakukan intervensi, dengan beberapa alasan. Pertama, pendidikan tinggi menghasilkan eksternalitas positif yang tidak sepenuhnya bisa ditangkap pasar, sehingga tanpa intervensi produksinya akan di bawah optimal secara sosial. Kedua, akses pendidikan dijamin konstitusi dan tidak seharusnya

se penuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Ketiga, kelompok berpenghasilan rendah tidak punya posisi tawar yang cukup di hadapan institusi pendidikan swasta. Bentuk intervensinya bisa berupa perluasan KIP Kuliah, regulasi batas kenaikan UKT per tahun, atau mendorong mekanisme subsidi silang di dalam institusi itu sendiri.

5. Digitalisasi Pembelajaran

1) Biaya Pendidikan dan Opportunity Cost

Dalam konteks digitalisasi, muncul komponen biaya baru yang sebelumnya tidak ada: perangkat digital dan kuota internet. Bagi keluarga mampu, ini biaya kecil. Tapi bagi keluarga kurang mampu, ini bisa menjadi hambatan nyata untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran.

Dari sudut pandang opportunity cost, situasinya dilematis. Kalau keluarga memilih membeli kuota, ada kebutuhan lain yang harus dikorbankan mungkin kebutuhan pokok yang tidak kalah penting. Tapi kalau tidak membeli dan akhirnya tidak bisa mengikuti pembelajaran, opportunity cost-nya juga besar: anak kehilangan kesempatan belajar yang berdampak langsung pada perkembangan kemampuan dan prospek masa depannya. Ini adalah trade-off yang tidak adil, dan seharusnya tidak dibebankan sepenuhnya pada individu.

2) Dampak Kesenjangan Digital dan Solusi Kebijakan

Dampak kesenjangan digital terhadap kualitas pendidikan cukup serius:

- Partisipasi belajar menurun pada kelompok siswa tidak mampu, sehingga mereka tertinggal secara akademis.
- Kesenjangan kompetensi antara siswa kaya dan miskin semakin melebar yang sudah punya akses terus berkembang, yang tidak punya akses makin tertinggal.
- Risiko putus sekolah meningkat jika hambatan teknis ini terus berlangsung tanpa solusi.

Solusi yang bisa dipertimbangkan:

- Subsidi perangkat dan paket data bagi siswa dari keluarga prasejahtera ini bisa diperluas dari program yang sudah ada seperti PIP.
- Menjadikan sekolah sebagai pusat akses digital komunitas, agar siswa tanpa perangkat di rumah tetap bisa belajar secara digital.
- Mendorong model pembelajaran hybrid yang benar-benar inklusif, tidak mengasumsikan semua siswa punya akses digital yang setara.
- Percepatan infrastruktur internet di daerah yang belum terlayani sebagai investasi jangka panjang.